

PROFIL

APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) TAHUN 2023



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan



YOZKI WANDRI, S.Pi., M.Si
KEPALA BKPSDM KAB. PESISIR SELATAN

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Buku Profil Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Edisi I tahun 2023 dapat kami selesaikan pada waktunya.

Penyusunan Buku Profil Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan serta merupakan perwujudan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 180 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.

Buku profil ini merupakan publikasi yang kami rencananya diterbitkan setiap tahun. Buku ini memuat gambaran tentang keadaan seluruh Aparatur Sipil Negara menurut status kepegawaiannya yang berada di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada akhir Tahun 2023. Gambaran keadaan Aparatur Sipil Negara pada buku profil ini disajikan dalam bentuk tabel dan dilengkapi dengan diagram.

Dengan disusunnya buku profil ini semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak dan pengambil kebijakan di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Buku profil ini masih jauh dari sempurna, sehingga diharapkan kritik dan saran agar dapat meningkatkan kualitas Buku ini.

Painan, 26 September 2024
Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pesisir Selatan



Yozki Wandri, S.Pi, M.Si
NIP. 19550101 200003 1 003

DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
C. METODE PENYUSUNAN.....	2
BAB II GAMBARAN UMUM BKPSDM	
KABUPATEN PESISIR SELATAN	
A. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	4
B. VISI MISI KABUPATEN PESISIR SELATAN.....	10
BAB III DESKRIPSI ASN KABUPATEN PESISIR SELATAN	
A. GAMBARAN UMUM ASN KABUPATEN PESISIR	
SELATAN.....	14
B. KOMPOSISI ASN KABUPATEN PESISIR SELATAN.....	18
BAB IV PENUTUP	
A. KESIMPULAN.....	39
B. SARAN.....	41

DAFTAR TABEL**BerAKHLAK** # bangga
melayani bangsa

<i>Tabel 1.</i>	<i>Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023.....</i>	18
<i>Tabel 2.</i>	<i>Jumlah ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2023.....</i>	19
<i>Tabel 3.</i>	<i>Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Ruang Tahun 2023.....</i>	22
<i>Tabel 4.</i>	<i>Jumlah PPPK Berdasarkan Golongan Tahun 2023.....</i>	24
<i>Tabel 5.</i>	<i>Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan Tahun 2023.....</i>	26
<i>Tabel 6.</i>	<i>Jumlah PNS Berdasarkan Jenis jabatan Eselonering Tahun 2023.....</i>	28
<i>Tabel 7.</i>	<i>Jenis Mutasi ASN Tahun 2023.....</i>	31
<i>Tabel 8.</i>	<i>Jumlah ASN yang Mencapai Batas Usia Pensiun Tahun 2023.....</i>	32
<i>Tabel 9.</i>	<i>Jumlah ASN Pensiun Atas Permintaan Sendiri Tahun 2023</i>	34
<i>Tabel 10.</i>	<i>Jumlah ASN Meninggal Dunia Tahun 2023.....</i>	35
<i>Tabel 11.</i>	<i>Jumlah PNS Pindah Keluar Pemkab Pesisir Selatan Tahun 2023.....</i>	36
<i>Tabel 12.</i>	<i>Jumlah PNS Pindah Masuk Ke Pemkab Pesisir Selatan Tahun 2023.....</i>	37
<i>Tabel 13.</i>	<i>Jumlah PNS Naik Pangkat Tahun 2023.....</i>	38

DAFTAR GAMBAR

BerAKHLAK # bangga
melayani bangsa

<i>Gambar 1.</i>	<i>Struktur Organsiasi BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan.....</i>	<i>9</i>
<i>Gambar 2.</i>	<i>Profil ASN Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.....</i>	<i>17</i>
<i>Gambar 3.</i>	<i>Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023.....</i>	<i>18</i>
<i>Gambar 4.</i>	<i>Jumlah ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2023.....</i>	<i>20</i>
<i>Gambar 5.</i>	<i>Jumlah PNS Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2023.....</i>	<i>23</i>
<i>Gambar 6.</i>	<i>Jumlah PPPK Berdasarkan Golongan Tahun 2023.....</i>	<i>25</i>
<i>Gambar 7.</i>	<i>Jumlah ASN berdasarkan jenis jabatan Tahun 2023.....</i>	<i>27</i>
<i>Gambar 8.</i>	<i>Jumlah PNS berdasarkan jabatan eselonering Tahun 2023.....</i>	<i>30</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional, diperlukan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya manusia, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN). ASN memegang peran kunci dalam merumuskan dan melaksanakan berbagai kebijakan pemerintah, pelayanan publik, serta pembangunan nasional. Oleh karena itu, penyediaan informasi yang komprehensif dan akurat mengenai profil ASN sangat penting untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan strategis, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Buku Profil ASN memberikan gambaran yang jelas mengenai data dan informasi penting terkait ASN, seperti kualifikasi pendidikan, jabatan, serta distribusi ASN di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Selain itu, profil ASN adalah alat untuk mendukung pengembangan karier ASN, penyusunan kebijakan sumber daya manusia, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Melalui buku profil ini, diharapkan para pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun masyarakat, dapat lebih memahami peran dan kontribusi ASN dalam pembangunan negara. Buku ini juga diharapkan menjadi referensi yang berguna dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pengembangan dan pemberdayaan ASN secara berkelanjutan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya buku Profil Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Profil Kepegawaian dimaksudkan untuk memberikan gambaran keadaan pegawai baik dari segi jumlah pegawai yang ada meliputi jenis kelamin, golongan, tingkat Pendidikan, jabatan baik jabatan fungsional maupun jabatan struktural dan sebagainya yang dapat menggambarkan keadaan ASN Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Penyusunan Profil Kepegawaian bertujuan agar data dan informasi kepegawaian terdokumentasi dan tersaji dengan baik.
3. Kelengkapan data dan informasi kepegawaian juga akan membantu dalam penyusunan rencana pengembangan pegawai serta penataan kelembagaan yang berorientasi pada Pengembangan Otonomi Daerah, sehingga tujuan Otonomi Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk aparatnya di setiap daerah termasuk Kabupaten Pesisir Selatan dapat tercapai dengan baik

C. METODE PENYUSUNAN

Penyusunan Buku Profil Aparatur Sipil Negara Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 ini disusun dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data kepegawaian berasal dari data yang telah diperbarui dalam aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg), yang disinkronkan dengan data pada aplikasi SIASN, serta dipadukan dengan data keuangan (penggajian) dari Sistem Informasi Manajemen Gaji yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk bulan Desember 2023.

2. Penyajian Data

Data yang disajikan dalam publikasi ini berupa data kuantitatif, dan disajikan dalam bentuk grafik dan data terpilah, sehingga dapat memberikan gambaran dan informasi yang lebih jelas.

BAB II GAMBARAN UMUM BKPSDM KABUPATEN PESISIR SELATAN

A. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan serta Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 180 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan beberapa fungsi, meliputi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

4. Pelaksanaan administrasi badan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan arahan dan petunjuk.

Berikut ini diuraikan tugas dan fungsi unit kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan:

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas pokok menetapkan kebijakan dan perencanaan teknis serta melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

2. Sekretaris Badan

Sekretaris memiliki tugas pokok untuk membantu Kepala Badan dalam menyiapkan konsep perumusan rencana, mengkoordinasikan, membagi tugas, memberikan petunjuk, serta menilai dan menganalisis pelaksanaan kegiatan di Sekretariat. Kegiatan ini meliputi urusan umum, kepegawaian, evaluasi, pelaporan, serta keuangan. Selain itu, Sekretaris juga bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh organisasi perangkat daerah dan bidang-bidang yang berada di lingkup Badan, sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Sekretaris Badan membawahi dan dibantu oleh berbagai sub bagian yang

bertugas untuk memastikan kelancaran operasional dan administratif di seluruh unit kerja di bawah lingkup Badan.

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki tugas untuk mengelola ketatausahaan, pemanfaatan barang milik daerah, serta pengelolaan rumah tangga. Selain itu, sub bagian ini juga bertanggung jawab atas pembinaan dan pengurusan administrasi umum serta administrasi aparatur di lingkungan Badan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berperan penting dalam memastikan bahwa semua kegiatan administratif berjalan dengan baik, mendukung kelancaran operasional Badan, serta menjaga hubungan yang efektif antar unit kerja. Hal ini mencakup pengelolaan dokumen, penyusunan laporan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan kepegawaian yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan bertugas Menyusun serta mempersiapkan rencana dan program kerja tahunan Badan, menyiapkan bahan kebijakan teknis perencanaan, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program atau kegiatan di lingkungan Badan, serta Menyusun anggaran program kerja. Selain itu, sub bagian ini juga bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi keuangan rutin,

pembukuan, penyusunan laporan pertanggungjawaban, pengelolaan perbendaharaan anggaran belanja Badan, dan pembinaan administrasi keuangan pembangunan di Lingkungan Badan.

3. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Aparatur Sipil Negara

Tugas pokok Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN, adalah menyusun rencana kebutuhan aparatur, pelaksanaan pengadaan aparatur, penyiapan proses pemberhentian, pengelolaan data dan informasi Aparatur baik data fisik maupun data elektronik, penyiapan sosialisasi, workshop, seminar dan bimbingan teknis Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Aparatur Sipil Negara dan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait.

Dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya, Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Aparatur Sipil Negara membawahi dan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Bidang Mutasi dan Promosi Aparatur Sipil Negara

Tugas pokok Bidang Mutasi dan Promosi Aparatur Sipil Negara adalah menyiapkan dan melaksanakan mutasi serta promosi aparatur berdasarkan evaluasi jabatan, kesesuaian kompetensi, kualifikasi, kinerja dan rekam jejak jabatan, menyusun pelaksanaan proses kenaikan pangkat PNS serta koordinasi dan kerjasama dalam kegiatan seleksi jabatan

5. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara

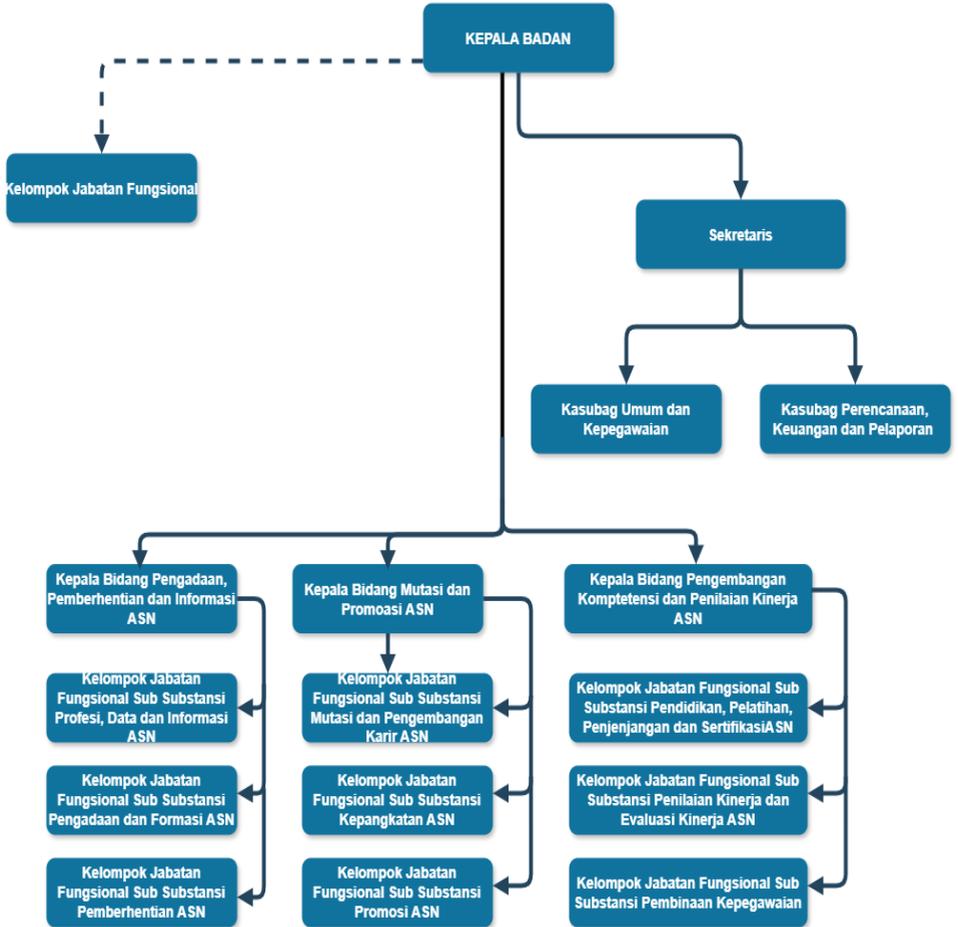
Tugas pokok Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja adalah Menyusun kebijakan tentang disiplin dan penghargaan. Menyusun kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta menyeleksi persyaratan pegawai yang mengajukan perceraian dan pernikahan, dan melaksanakan pengembangan kompetensi pegawai yang akan mengikuti tugas belajar atau diklat fungsional dan kepemimpinan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas kelompok jabatan fungsional mencakup pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan pelayanan fungsional, yang didasarkan pada keahlian dan keterampilan sesuai dengan bidang unit kerja masing-masing. Pejabat fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

Untuk lebih jelasnya mengenai Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan, dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1
STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESIRIS SELATAN
(Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 180 Tahun 2021)



B. VISI MISI KABUPATEN PESISIR SELATAN

1. VISI KABUPATEN PESISIR SELATAN

Visi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati, adalah: **“Mewujudkan Pesisir Selatan yang Lebih Sejahtera, Maju, dan Bermartabat, Didukung oleh Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional”**. Filosofi yang terkandung dalam visi ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- SEJAHTERA** : Meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan akses pelayanan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
- MAJU** : Terwujudnya masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang unggul, professional, berperadaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia, serta memiliki wawasan kedepan.
- BERMARTABAT** : Kehidupan Berbangsa dan bernegara bertumpu pada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan ABS-SBK.
- AKUNTABEL** : Memberikan pertanggungjawaban atau

menjelaskan kinerja atas Tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban

PROFESIONAL : Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi publik, semakin transparan dan efektifnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

2. MISI KABUPATEN PESISIR SELATAN

Misi merupakan kondisi yang harus dipenuhi agar visi yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan memperhatikan kondisi objektif yang terdapat di daerah. Misi pembangunan daerah dalam RPJP Kabupaten Pesisir Selatan ditetapkan sebagai berikut:

Misi 1 : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.

Misi 2 : Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.

Misi 3 : Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah.

- Misi 4 : Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Daerah Tujuan Wisata yang nyaman dan berkesan.
- Misi 5 : Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing.
- Misi 6 : Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tertntasm dan dinamis.

Misi yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi BKPSDM sebagai pengelola aparatur pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah misi pertama, yaitu : **“Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan”**.

3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pesisir Selatan untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi selaras dengan visi yang telah ditetapkan. Dalam rangka mencapai visi tersebut, BKPSDM berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta dapat mengoptimalkan potensi ASN, meningkatnya kompetensi, dan menjamin pengelolaan sumber daya manusia yang transparan dan akuntabel.

Sebagai bagian dari misi yang mendukung visi tersebut, BKPSDM akan mengimplementasikan program-program yang

bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan memfasilitasi kolaborasi antar ASN.

Melalui upaya ini, BKPSDM tidak hanya berperan sebagai pengelola kepegawaian, tetapi juga sebagai pendorong perubahan dalam birokrasi, yang akan mendukung pencapaian tujuan jangka Panjang Kabupaten Pesisir Selatan.

Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

- a. **Peningkatan Kualitas Pelayanan** : Meningkatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat dengan standar yang lebih tinggi.
- b. **Pengembangan Kompetensi ASN** : Melaksanakan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN).
- c. **Pengelola SDM yang Efektif** : Meningkatkan system pengelolaan sumber daya manusia yang lebih transparan dan akuntabel.
- d. **Evaluasi dan Pengawasan Kinerja** : Mengimplementasikan system evaluasi dan pengawasan kinerja yang berkelanjutan untuk semua ASN.
- e. **Penerapan Teknologi Informasi** : Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan kepegawaian dan pelayanan public.

BAB III

DESKRIPSI ASN KABUPATEN PESISIR SELATAN

A. GAMBARAN UMUM ASN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Pesisir Selatan berperan penting dalam mengimplementasikan kebijakan publik dan menjalankan fungsi pemerintahan yang efisien. Dengan komitmen untuk menciptakan birokrasi yang profesional dan akuntabel, ASN Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terus berupaya meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik yang sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah.

Sejalan dengan upaya ini, untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas di bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Pelayanan Kemasyarakatan, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Berdasarkan Perda tersebut, Satuan Kerja di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari Sekretaris Daerah yang mencakup 3 (tiga) Asisten, 10 (sepuluh) Bagian, Sekretariat DPRD, 16 (enam belas) Dinas Daerah, 5 (lima) Badan dan Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari Inspektorat Kabupaten, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten, 2 (dua) RSUD serta 15 (lima belas) Kecamatan. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan selengkapnya adalah sebagai berikut :

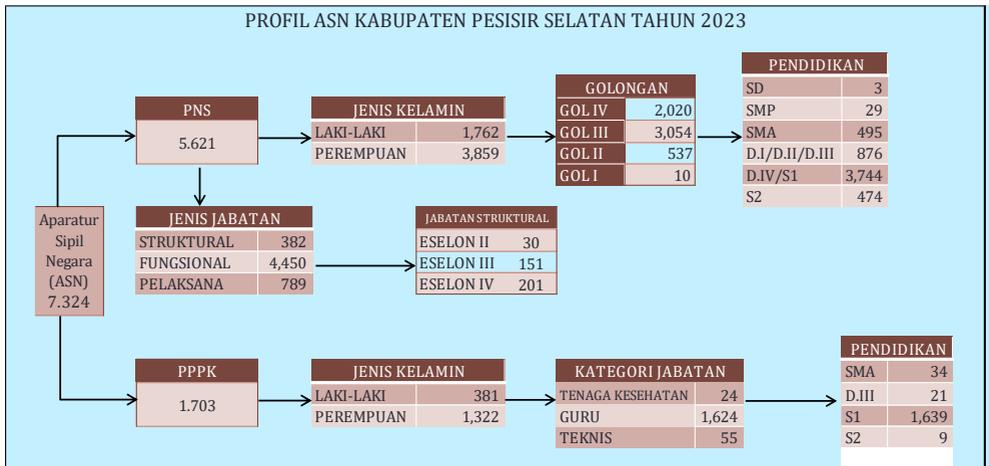
1. Sekretariat Daerah
 - 1.1 Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I)
 - 1.2 Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II)
 - 1.3 Asisten Bidang Administrasi Umum (Asisten III)
 - 1.4 Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum Dan Politik
 - 1.5 Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan
 - 1.6 Kepala Bagian Tata Pemerintahan Dan Kerja Sama
 - 1.7 Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
 - 1.8 Kepala Bagian Hukum
 - 1.9 Kepala Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam
 - 1.10 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
 - 1.11 Kepala Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa
 - 1.12 Kepala Bagian Umum
 - 1.13 Kepala Bagian Organisasi
 - 1.14 Kepala Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan
 - 1.15 Kepala Bagian Perencanaan Dan Keuangan
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat
4. Badan
 - 4.1 Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
 - 4.2 Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
 - 4.3 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - 4.4 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - 4.5 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5. Dinas
 - 5.1 Dinas Kesehatan
 - 5.2 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - 5.3 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 5.4 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

- BerAKHLAK
- # bangga
madyakara
bangsa
- 5.5 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
 - 5.6 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
 - 5.7 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - 5.8 Dinas Pertanian
 - 5.9 Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
 - 5.10 Dinas Perikanan Dan Pangan
 - 5.11 Dinas Perhubungan
 - 5.12 Dinas Komunikasi Dan Informatika
 - 5.13 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Dan Lingkungan Hidup
 - 5.14 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Tenaga Kerja
 - 5.15 Dinas Perdagangan Dan Transmigrasi
 - 5.16 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
 6. Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
 7. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan
 8. Rumah Sakit Umum Daerah Tapan
 9. Kecamatan
 - 9.1 Kantor Camat Koto XI Tarusan
 - 9.2 Kantor Camat Bayang
 - 9.3 Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara
 - 9.4 Kantor Camat IV Jurai
 - 9.5 Kantor Camat Batang Kapas
 - 9.6 Kantor Camat Sutera
 - 9.7 Kantor Camat Lengayang
 - 9.8 Kantor Camat Ranah Pesisir
 - 9.9 Kantor Camat Linggo Sari Baganti
 - 9.10 Kantor Camat Airpura
 - 9.11 Kantor Camat Pancung Soal
 - 9.12 Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan
 - 9.13 Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan
 - 9.14 Kantor Camat Lunang
 - 9.15 Kantor Camat Silaut

Jumlah Aparatur Sipil Negara se-Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan data yang terupdate sampai dengan Desember 2023 yaitu sebanyak 7.324 orang dengan rincian jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 5.621 orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 1.703 orang. Dengan mengesampingkan status kependudukan ASN, jumlah ASN yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023 mencapai 1,42% dari total populasi sebesar 516.600 jiwa

Secara garis besar, maka profil Pegawai Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dapat digambarkan, sebagai berikut:

Gambar 2
Profil ASN Kabupaten Pesisir Selatan



B. KOMPOSISI ASN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Berikut komposisi Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Jenis Kelamin

Komposisi perbandingan Aparatur Sipil Negara berdasarkan Jenis kelamin seperti tersebut dalam tabel di bawah ini:

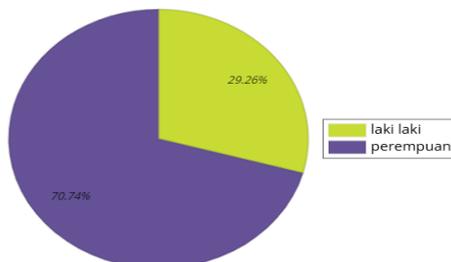
Tabel 1
Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023

No	Jenis Pegawai	Jenis Kelamin		Jumlah
		Perempuan	Laki-laki	
1	PNS	3,859	1,762	5,621
2	PPPK	1,322	381	1,703
Total ASN		5,181	2,143	7,324

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Pesisir Selatan didominasi oleh perempuan, yang mencapai 70,74% dari total jumlah ASN yang ada. Sebaliknya, ASN laki-laki hanya mencapai 29,26%. Perbandingan ini dapat dilihat secara jelas pada grafik di bawah ini.

Gambar 3
Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023

ASN BERDASARKAN JENIS KELAMIN



2. Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Komposisi data ASN menurut jenjang pendidikan di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan per Desember 2023 masih didominasi oleh lulusan Sarjana (S1), terutama pada tenaga pendidik. Untuk melihat lebih detail mengenai komposisi dan perbandingan jumlah ASN Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan tingkat pendidikan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2

Jumlah ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2023

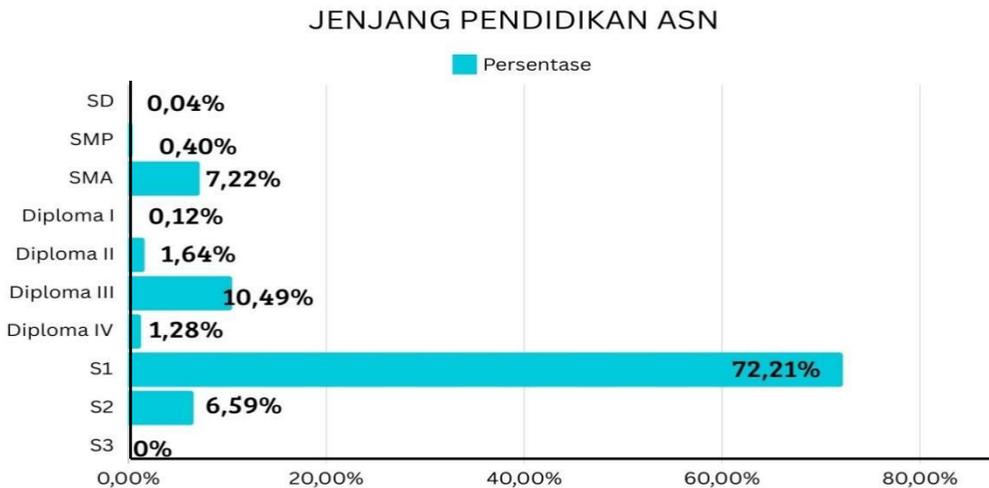
<i>Pendidikan</i>	<i>Perempuan</i>	<i>Laki-laki</i>	<i>Jumlah</i>
<i>SD</i>	1	2	3
<i>SMP</i>	4	25	29
<i>SMA</i>	227	302	529
<i>Diploma I</i>	7	2	9
<i>Diploma II</i>	79	41	120
<i>Diploma III</i>	684	84	768
<i>Diploma IV</i>	74	20	94
<i>S1</i>	3.865	1.424	5.289
<i>S2</i>	240	243	483
<i>S3</i>	0	0	0
<i>Total ASN</i>	<i>5.181</i>	<i>2.143</i>	<i>7.324</i>

Berdasarkan data pada tabel, Jumlah ASN dengan jenjang pendidikan S1 mencapai 5.289 (72,21%), diikuti oleh jenjang D.IV sebanyak 94 orang (1,28%). Pada posisi berikutnya sebanyak 768 orang (10,49%) dengan jenjang pendidikan Diploma III, sementara sebanyak 529 orang (7,22%) berpendidikan SMA. ASN dengan jenjang pendidikan S2 berjumlah 483 (6,59%). Disusul oleh

jenjang pendidikan Diploma II sebanyak 120 orang (1,64%). Adapun ASN dengan jenjang pendidikan SMP sederajat sebanyak 29 orang (0,40%), Diploma I sebanyak 9 orang (0,12%), dan yang terakhir pada jenjang pendidikan SD sederajat sebanyak 3 orang atau (0,04%).

Untuk memperjelas perbandingan Jumlah ASN berdasarkan jenjang pendidikan, dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 4
Jumlah ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2023



Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa jenjang pendidikan ASN di Kabupaten Pesisir Selatan didominasi oleh lulusan S1, yang mencapai 72,21% dari total ASN. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas ASN memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Sementara itu, jenjang

pendidikan Diploma III berada di posisi kedua dengan 10,49%, diikuti oleh SMA sederajat dengan 7,22%. ASN dengan jenjang pendidikan S2 sebanyak 6,59%, yang menunjukkan adanya peningkatan pendidikan ke tingkat yang lebih lanjut. Selanjutnya ASN dengan jenjang pendidikan Diploma II sebanyak 1,64%, Diploma I sebanyak 0,12%, sedangkan SMP dan SD sederajat memiliki persentase yang sangat kecil, masing-masing hanya 0,40% dan 0,04%, menunjukkan bahwa hampir seluruh ASN memiliki tingkat pendidikan menengah ke atas. Secara keseluruhan, tingkat pendidikan ASN di Kabupaten Pesisir Selatan terbilang tinggi, yang diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

3. Berdasarkan Golongan Ruang

Komposisi perbandingan Pegawai Negeri Sipil di lingkup Kabupaten Pesisir Selatan secara keseluruhan berdasarkan golongan dan pangkat dapat dilihat pada tabel berikut:

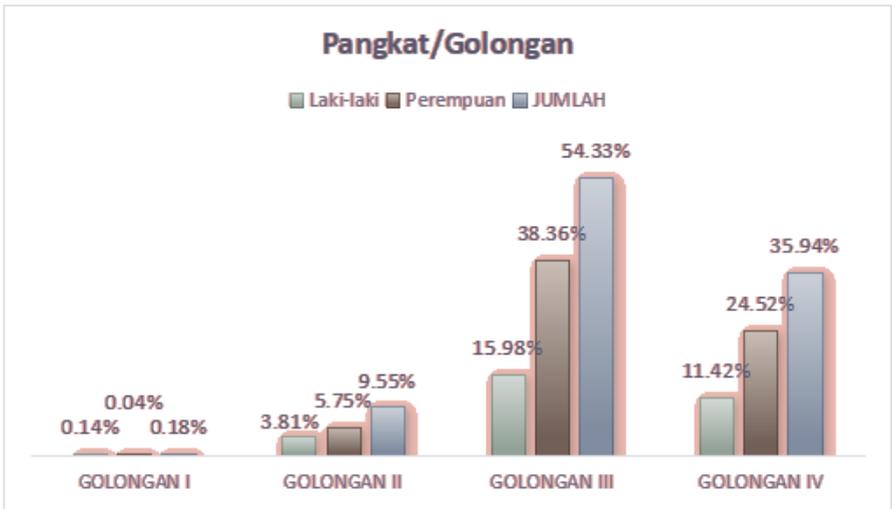
Tabel 3
Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Ruang Tahun 2023

Golongan	Perempuan	Laki-laki	Jumlah
I/a	0	0	0
I/b	0	0	0
I/c	1	1	2
I/d	1	7	8
II/a	3	9	12
II/b	18	33	51
II/c	105	66	171
II/d	197	106	303
III/a	338	187	525
III/b	431	177	608
III/c	469	179	648
III/d	918	355	1.273
IV/a	597	284	881
IV/b	771	327	1.098
IV/c	10	29	39
IV/d	0	2	2
IV/e	0	0	0
Jumlah	3.859	1.762	5.621

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa PNS lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan per Desember Tahun 2023 masih didominasi oleh Pegawai Negeri Sipil dengan golongan III sebanyak 3.054 orang atau 54,33%. Kemudian diikuti oleh Pegawai Golongan IV sebanyak 2.020 orang atau setara dengan 35,94%, Golongan II sebanyak 537 orang

atau 9,55%, dan yang terkecil Golongan I sebanyak 10 orang atau setara dengan 0,18%. Perbandingan PNS Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat pada grafik di berikut:

Gambar 5
Jumlah PNS Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2023



Grafik di atas menunjukkan bahwa mayoritas PNS di Kabupaten Pesisir Selatan berada pada golongan yang lebih tinggi, yang berimplikasi pada peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan publik.

Selain PNS yang telah disebutkan di atas Kabupaten Pesisir Selatan juga memiliki PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) Tenaga Guru, Tenaga Kesehatan dan Teknis, dengan rincian sebagai berikut:

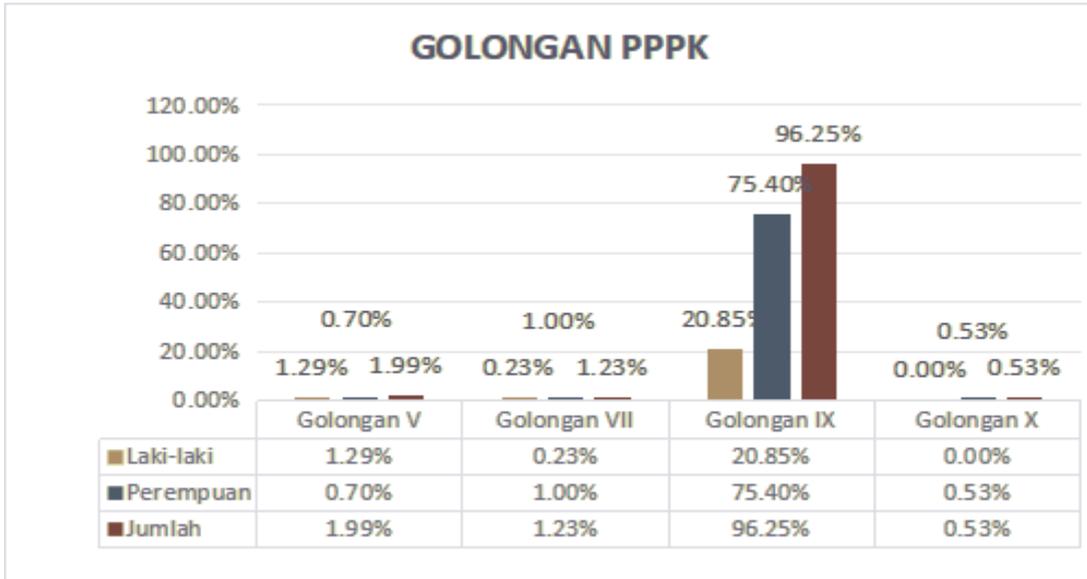
Tabel 4
Jumlah PPPK Berdasarkan Golongan Tahun 2023

Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Kelas V	22	12	34
Kelas VII	4	17	21
Kelas IX	355	1.284	1.639
Kelas X	-	9	9
Jumlah	381	1.322	1.703

Berdasarkan tabel 4, PPPK Golongan IX menduduki posisi terbanyak dengan jumlah sekitar 1.639 orang, atau setara dengan 96,24%, dikarenakan banyak yang telah memiliki pendidikan S1. Posisi kedua diisi oleh Golongan V dengan 34 orang, atau 2%, diikuti oleh Golongan VII dengan 21 orang, atau 1,23%. Terakhir, Golongan X sebanyak 9 orang, atau 0,53%.

Perbandingan PPPK Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan golongan dan jenis kelamin dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 6
Jumlah PPPK berdasarkan golongan Tahun 2023



3. Berdasarkan Jenis Jabatan

Komposisi Aparatur Sipil Negara berdasarkan jenis jabatan dapat dilihat pada tabel berikut:

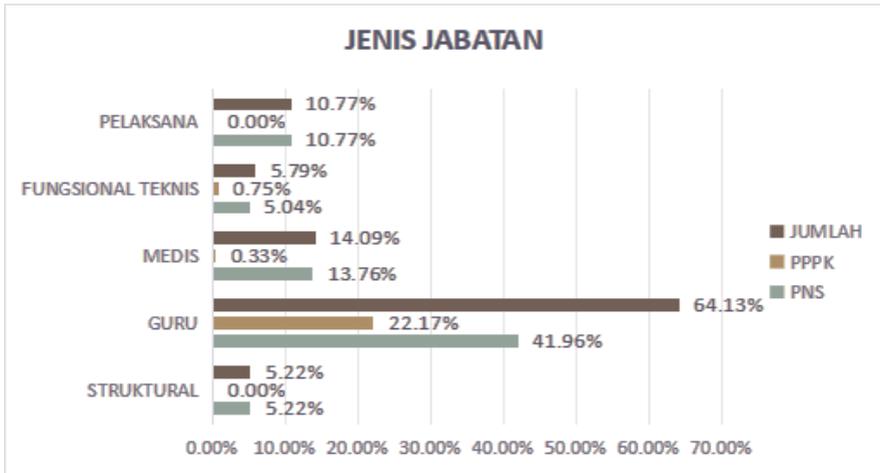
Tabel 5
Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Jabatan Tahun 2023

JABATAN	PNS	PPPK	JUMLAH
STRUKTURAL	382	-	382
GURU	3.073	1.624	4.697
MEDIS	1.008	24	1.032
FUNGSIONAL TEKNIS	369	55	424
PELAKSANA	789	-	789
JUMLAH	5.621	1.703	7.324

Dari data yang ditampilkan pada tabel, dapat dilihat bahwa ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan per Desember 2023 masih didominasi oleh ASN dengan jabatan guru sebanyak 4.697 orang, atau 64,13%. Kemudian diikuti oleh pemangku jabatan fungsional medis sebanyak 1.032 orang, setara dengan 15,09%, pemangku jabatan pelaksana sebanyak 789 orang, atau 10,77%, pemangku jabatan fungsional teknis sebanyak 424 orang, atau 5,79%, dan yang terkecil, pemangku jabatan struktural sebanyak 382 orang, setara dengan 5,22%.

Perbandingan ASN Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan jenis jabatan dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 7
Jumlah ASN berdasarkan jenis jabatan Tahun 2023



ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan per Desember 2023 didominasi oleh pegawai dengan jabatan guru, yang mencapai 64,13% dari total ASN. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pendidikan memiliki proporsi pegawai yang paling besar dibandingkan sektor lainnya. Jabatan fungsional medis menempati urutan kedua dengan 15,09%, menunjukkan pentingnya sektor kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan. Jabatan pelaksana dan fungsional teknis masing-masing berkontribusi 10,77% dan 5,79%. Sedangkan, pegawai yang menduduki jabatan struktural merupakan yang paling sedikit, hanya 5,22%. Ini menunjukkan bahwa mayoritas ASN di Kabupaten Pesisir Selatan terfokus pada jabatan-jabatan yang berhubungan langsung dengan pelayanan

kesehatan dan pendidikan, sementara jabatan struktural, yang bersifat manajerial, memiliki jumlah yang lebih terbatas.

4. Berdasarkan Jabatan Eselonering

Data pegawai yang dikelompokkan berdasarkan jabatan eselonering memberikan gambaran tentang sebaran dan jumlah pegawai yang menduduki posisi kepemimpinan di berbagai tingkatan birokrasi, serta komposisi jabatan struktural pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Komposisi Aparatur Sipil Negara berdasarkan jenis jabatan eselonering dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6

Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Jabatan Eselonering Tahun 2023

ESELONERING	LAKI LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
II. A	1	0	1
II. B	26	3	29
III. A	39	15	54
III. B	65	32	97
IV. A	68	80	148
IV. B	17	36	53
JUMLAH	216	166	382

Berdasarkan tabel di atas, distribusi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Pesisir Selatan menurut eselonering didominasi oleh

Pejabat Eselon IV, dengan jumlah 201 orang (52,62%). Pejabat Eselon IV dengan jenis kelamin perempuan berjumlah 116 orang atau 30,37%, sedangkan laki-laki berjumlah 85 orang atau 22,25%.

Selanjutnya, Pejabat Eselon III didominasi oleh laki-laki dengan jumlah 104 orang atau 27,23%, sedangkan perempuan berjumlah 47 orang atau 12,30%, dengan total Pejabat Eselon III sebanyak 151 orang (39,53%).

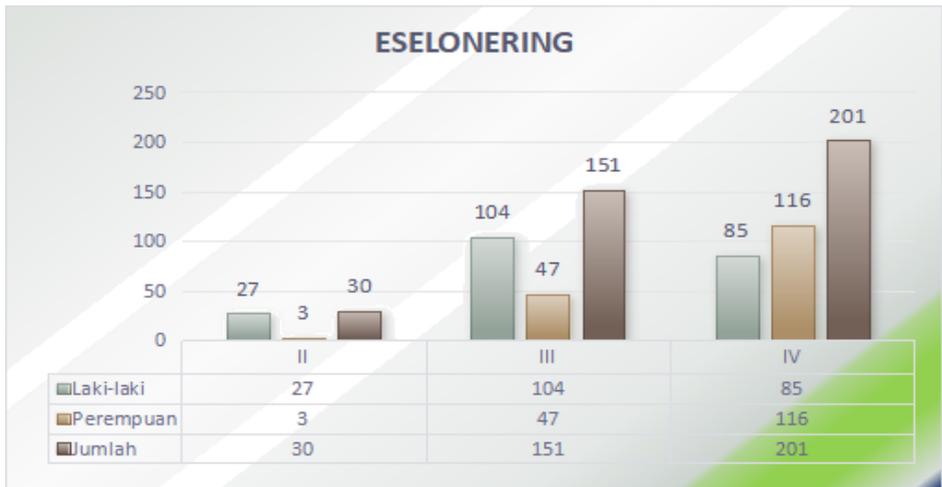
Adapun Pejabat Eselon II juga didominasi oleh laki-laki, dengan jumlah 27 orang atau 7,07%, sementara perempuan berjumlah 3 orang atau 0,79%, sehingga total Pejabat Eselon II mencapai 30 orang (7,85%).

Perbandingan PNS Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan jabatan eselonering dapat dilihat pada grafik berikut:

Perbandingan PNS Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan jabatan eselonering dapat dilihat pada grafik berikut:

BerAKHLAK # bangga berprestasi

Grafik 6
Jumlah PNS berdasarkan jabatan Eselonering Tahun 2023



Berdasarkan data distribusi PNS di Kabupaten Pesisir Selatan menurut eselonering, dapat disimpulkan bahwa mayoritas jabatan struktural dipegang oleh Pejabat Eselon IV, dengan proporsi tertinggi didominasi oleh perempuan. Sebaliknya, Pejabat Eselon III dan Eselon II lebih banyak diisi oleh laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa dalam jabatan eselonering yang lebih tinggi, keterwakilan perempuan cenderung lebih rendah dibandingkan laki-laki, sementara di jabatan eselon yang lebih rendah (Eselon IV),

keterwakilan perempuan lebih signifikan. Kesenjangan gender dalam pengisian jabatan struktural, khususnya di tingkat eselon yang lebih tinggi, masih terlihat cukup nyata.

BerAKHLAK # bangga
melakukan
perubahan

A. MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Sistem kepegawaian bersifat dinamis, jumlah dan komposisi PNS terus mengalami penyesuaian, yang berdampak kepada perubahan jumlah dan struktur PNS. Hal ini disebabkan oleh:

1. Mutasi Cuti Luar Tanggungan Negara;
2. Penerimaan CPNS;
3. Mutasi Pindah keluar Wilayah Kerja;
4. Mutasi Pindah masuk ke Wilayah Kerja;
5. Mutasi Pindah antar OPD lingkup Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Mutasi Pemberhentian;
7. Mutasi Pensiun

Kedaaan PNS Kabupaten Pesisir Selatan per Desember 2023 dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berkontribusi terhadap perkembangan dan penyusutan jumlah serta komposisi PNS, di antaranya:

Tabel 7
Jenis Mutasi ASN Tahun 2023

1.	Cuti diluar Tanggungan Negara	0	Orang
2.	Pensiun BUP	343	Orang
3.	Pensiun Atas Permintaan Sendiri	4	Orang
4.	Meninggal Dunia	27	Orang
5.	Mutasi Pindah Masuk	32	Orang
6.	Mutasi Pindah Keluar	27	Orang
7.	PPPK Formasi 2022	1.262	Orang
8.	Pemberhentian Pegawai	2	Orang

1. PNS YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN TAHUN 2023

Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki batas usia pensiun yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, dan batas tersebut bervariasi tergantung pada jenis jabatan yang diemban oleh masing-masing ASN. Di Kabupaten Pesisir Selatan, PNS yang mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) pada tahun 2023 tercatat sebanyak 340 orang sedangkan PPPK sebanyak 3 orang.

Untuk memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai jumlah ASN yang pensiun karena mencapai Batas Usia Pensiun di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8
Jumlah ASN yang Mencapai Batas Usia Pensiun Tahun 2023

BULAN	PNS	PPPK	JUMLAH
JANUARI	67	3	70
FEBRUARI	26	0	26
MARET	15	0	15
APRIL	35	0	35
MEI	26	0	26
JUNI	39	0	39
JULI	32	0	32
AGUSTUS	24	0	24
SEPTEMBER	22	0	22
OKTOBER	21	0	21
NOVEMBER	21	0	21
DESEMBER	12	0	12
TOTAL	340	3	343

Jumlah ASN yang pensiun terbesar terjadi pada bulan Januari dengan 70 orang, termasuk 3 orang PPPK, sedangkan bulan dengan jumlah pensiun terendah adalah Desember, dengan hanya 12 orang. Total pensiun sepanjang tahun mencapai 343 orang, terdiri dari 340 PNS dan 3 PPPK.

2. PENSIUN ATAS PERMINTAAN SENDIRI

Pengajuan pensiun atas permintaan sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, serta peraturan lainnya yang

berlaku. Secara umum, pengajuan pensiun atas permintaan sendiri adalah hak yang dimiliki oleh setiap PNS, namun tetap bergantung pada persetujuan pejabat yang berwenang dan syarat-syarat tertentu.

Di Kabupaten Pesisir Selatan terdapat 12 orang yang mengajukan Pensiun atas permintaan sendiri dan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9
Jumlah ASN Pensiun Atas Permintaan Sendiri Tahun 2023

Jabatan	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah
Pelaksana	-	-	1	1	2
Fungsional Teknis	-	-	-	1	1
Guru/Pengawas	-	-	-	4	4
Tenaga Kesehatan	-	-	2	2	4
Struktural	-	-	-	1	1
Jumlah			2	10	12

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas permintaan sendiri pada umumnya dilakukan dengan tujuan untuk mengikuti pemilihan calon legislatif pada tahun 2024. Langkah ini diambil oleh sejumlah PNS yang berkeinginan untuk berkiprah di dunia politik, mengingat peraturan kepegawaian secara tegas melarang PNS aktif terlibat dalam kegiatan politik praktis. Oleh karena itu, PNS yang bermaksud mencalonkan diri sebagai anggota legislatif

diwajibkan untuk mengundurkan diri dari status kepegawaiannya.

3. PENSIUN JANDA DUDA

PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang meninggal dunia pada tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 10
Jumlah ASN Meninggal Dunia Tahun 2023

Jabatan	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah
Pelaksana	-	1	3	-	4
Fungsional Teknis	-	-	2	-	2
Guru/Pengawas	-	-	7	11	18
Tenaga Kesehatan	-	-	2	-	2
Struktural	-	-	1	-	1
Jumlah	-	1	15	16	27

Secara keseluruhan, sebanyak 27 PNS meninggal dunia pada tahun 2023. Dari jumlah tersebut, mayoritas berasal dari jabatan guru/pengawas sebanyak 18 orang, dengan rincian 7 orang dari Golongan III dan 11 orang dari Golongan IV. Jabatan pelaksana mencatat kematian sebanyak 4 orang, terdiri dari 1 orang di Golongan II dan 3 orang di Golongan III. Selain itu, tenaga kesehatan dan fungsional teknis masing-masing mencatat kematian sebanyak 2 orang,

semuanya berasal dari Golongan III. Pada jabatan struktural, terdapat 1 orang yang meninggal dunia.

4. PNS MUTASI PINDAH KELUAR

PNS yang telah mengajukan pindah dari kabupaten Pesisir Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 11
Jumlah ASN Pindah Keluar Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

Jabatan	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah
Pelaksana	-	1	3	-	4
Fungsional Teknis	-	-	2	-	2
Guru/Pengawas	-	-	7	11	18
Tenaga Kesehatan	-	-	2	-	2
Struktural	-	-	1	-	1
Jumlah	-	1	15	16	27

Berdasarkan tabel di atas, mutasi pindah keluar PNS Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2023 menunjukkan bahwa mayoritas mutasi tersebut dilakukan oleh pegawai dengan jabatan guru/pengawas, sebanyak 18 orang. Selain itu, terdapat 4 orang pegawai dengan jabatan pelaksana, 2 orang pegawai dari jabatan fungsional teknis dan tenaga

kesehatan, serta 1 orang pegawai dengan jabatan struktural.

5. PNS MUTASI PINDAH MASUK

PNS yang telah pindah ke kabupaten Pesisir Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 12
Jumlah PNS Pindah ke Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

Jabatan	Gol I	Gol	Gol	Gol IV	Jumlah
Pelaksana	-	2	5	-	7
Fungsional Teknis	-	-	-	-	0
Guru/Pengawas	-	-	17	-	17
Tenaga Kesehatan	-	2	3	2	6
Struktural	-	-	1	-	1
Jumlah		4	26	2	32

Dari tabel Jumlah ASN yang Pindah ke Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas PNS yang pindah ke Kabupaten Pesisir Selatan adalah pegawai dengan jabatan guru, sebanyak 17 orang. Selanjutnya, terdapat 7 orang pegawai dengan jabatan pelaksana, 6 orang pegawai dari jabatan tenaga kesehatan, dan 1 orang pegawai dengan jabatan struktural.

6. KENAIKAN PANGKAT TAHUN 2023

Pada Tahun 2023, Jumlah PNS yang naik pangkat berjumlah 1.145 orang dengan rincian sebagai berikut :

*Tabel 13
Jumlah PNS Naik Pangkat Tahun 2023*

TMT NAIK PANGKAT	PANGKAT/GOLONGAN												
	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	JML
APRIL 2023	1	2	10	9	28	152	108	145	110	51	-	-	616
OKTOBER 2023	1	2	7	7	88	66	105	106	92	48	6	1	529
JUMLAH	2	4	17	16	116	218	213	251	202	99	6	1	1.145

Pada tahun 2023, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengalami kenaikan pangkat mencapai 1.145 orang. Dari jumlah tersebut, 39 orang naik pangkat di golongan ruang II, sedangkan 798 orang mengalami kenaikan pangkat di golongan ruang III. Selain itu, terdapat 308 orang yang naik pangkat di golongan ruang IV. Kenaikan pangkat yang paling signifikan terjadi dari golongan III/c ke III/d, dengan jumlah sebanyak 251 orang. Di sisi lain, kenaikan pangkat yang paling sedikit terjadi dari golongan IV/c ke IV/d, yaitu hanya 1 orang. Data ini mencerminkan dinamika karier PNS yang berlangsung selama tahun 2023.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Secara keseluruhan, profil Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Pesisir Selatan menggambarkan tentang struktur kepegawaian, komposisi demografis, tingkat pendidikan, dan distribusi jabatan pegawai. Secara umum terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan pada data kepegawaian sebagai berikut :

1. Berdasarkan data komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Pesisir Selatan, proporsi ASN perempuan mencapai 70,74% dari total ASN, sedangkan proporsi ASN laki-laki hanya sebesar 29,26%. Hal ini mencerminkan perbedaan yang signifikan dalam komposisi ASN, di mana jumlah perempuan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki.
2. Berdasarkan data jenjang pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Pesisir Selatan, sebagian besar ASN memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, dengan lulusan S1 sebagai jenjang pendidikan yang paling dominan, yaitu sebesar 72,21% dari total ASN. Hal ini mencerminkan bahwa sebagian besar ASN di Kabupaten Pesisir Selatan memiliki kualifikasi akademis

- yang sesuai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi jabatan secara profesional.
3. Berdasarkan data komposisi golongan Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan per Desember 2023, sebagian besar PNS berada pada Golongan III, yaitu sebanyak 3.054 orang atau 54,33% dari total PNS. Jumlah ini menunjukkan bahwa sebagian besar PNS di Kabupaten Pesisir Selatan berada pada jenjang golongan yang mencerminkan kualifikasi dan pengalaman yang sesuai untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan PNS.
 4. Berdasarkan data komposisi jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan per Desember 2023, mayoritas ASN menduduki jabatan sebagai guru, dengan jumlah 4.697 orang atau 64,13% dari total ASN. Data ini menggambarkan distribusi jabatan ASN yang lebih berfokus pada pelayanan pendidikan.
 5. Berdasarkan data eselonering di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan per Desember 2023, terdapat kecenderungan dominasi laki-laki di setiap jenjang eselon, terutama pada Eselon III dan II, di mana jumlah pejabat laki-laki jauh lebih tinggi dibandingkan perempuan. Pada Eselon IV, terdapat 201 pejabat, di

mana laki-laki berjumlah 85 orang (22,25%) dan perempuan 116 orang (30,37%). Pada Eselon III, dari total 151 pejabat, laki-laki berjumlah 104 orang (27,23%) sementara perempuan hanya 47 orang (12,30%). Adapun pada Eselon II, dari total 30 pejabat, laki-laki berjumlah 27 orang (7,07%) dan perempuan 3 orang (0,79%). Hal ini mencerminkan ketidakseimbangan dalam representasi antara laki-laki dan perempuan dalam struktur kepegawaian di berbagai eselon, sehingga penting untuk merumuskan kebijakan yang mendukung peningkatan keterwakilan perempuan dan mengoptimalkan potensi PNS perempuan dalam posisi-posisi strategis di pemerintahan.

BerAKHLAK
bangga
Ciptakan
Kemajuan

B. SARAN

Berdasarkan profil Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Pesisir Selatan yang telah disajikan, berikut adalah saran yang dapat dipertimbangkan untuk pengembangan kepegawaian di Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:

1. Perlu kebijakan yang lebih proaktif dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di posisi-posisi strategis dalam pemerintahan dengan mempertimbangkan pendidikan,

kompetensi, dan pengalaman PNS perempuan agar dapat bersaing dengan PNS Laki laki untuk mengisi jabatan strategis. Karena baik laki-laki maupun perempuan, seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama dalam promosi dan pengembangan karir.

2. Penting untuk menyediakan pelatihan lanjutan dan pendidikan profesional bagi ASN dan fokus pada pengembangan kompetensi teknis dan manajerial, guna meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi jabatan.
3. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebaiknya melakukan evaluasi terhadap distribusi jabatan ASN, terutama yang berkaitan dengan pelayanan pendidikan. Dapat dipertimbangkan untuk mengisi jabatan lain dan mendorong ASN untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang, bukan hanya sebagai guru.

Implementasi saran-saran tersebut diharapkan dapat mendorong Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih seimbang, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan kualitas layanan publik yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN).